

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	18/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPTSP-2017
	TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	
<p>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN</p>	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013</p>
	NAMA SOP	SOP IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M- 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi 2. Izin Gangguan (HO) 3. Izin mendirikan bangunan (IMB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	<p>Berkas Permohonan Izin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk IUPPT yang berdiri sendiri <ol style="list-style-type: none"> a. FC surat izin prinsip dari Bupati b. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang c. FC surat izin lokasi d. FC surat izin Gangguan (HO) e. FC surat izin mendirikan bangunan (IMB) f. FC akte pendirian/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yg berbadan hukum PT atau koperasi g. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku h. Rekomendasi dari dinas Perindagnaker 2. Untuk IUPPT yang terintegrasi dg pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang b. FC akte pendirian/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yg berbadan hukum PT atau koperasi c. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil d. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku e. Rekomendasi dari dinas Perindagnaker 	